

Volume 10 Nomor 1 April 2023

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

POLITIK HUKUM

(**Konsep Oligarki Dalam Pandangan *Siyāsah Syar'iyah***)

Miftahol Fajar Sodik

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Email: miftaholunija@gmail.com

ABSTRACT

Political oligarchy represents a political system controlled by minorities in a country. Participation in the exploitation of the government of small groups often results in justice, arbitrariness that has political ownership rights of the small community, who have them as the bourgeoisie in the status of national and state life. The view of siyasah syar'iyah which is derived from the principles of the Koran and hadith explains that the existence of a political system must be directed towards religious maintenance and social harmonization, therefore the existence of the government is burdened as a mandate for the welfare of society without differences in social status. As for one of the practices of nationalism without social differences taught by the Prophet Muhammad, it can be seen from the context of the Medina Charter as a constitution and a joint commitment between Muslims and non Muslims to live as a state with a common goal of being able to live in prosperity both socially, economically and political. As for the problems in this article, namely those related to Jeffrey A. Winters' views regarding political oligarchy and how the views of siyasah syar'iyah criticize it, this research is a library research which is descriptive analysis in nature.

Keywords: *Oligarchy: Political System: Siyasah Syar'iyah*

ABSTRAK

Oligarki politik merupakan serangkaian sistem politik yang dikuasai oleh kaum minoritas dalam sebuah negara. Peran serta eksploitasi pemerintahan kelompok kecil tidak jarang menimbulkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan bahkan pembatasan hak politik masyarakat kecil, yang keberadaannya dinilai sebagai kaum borjuis dalam artian status hidup berbangsa dan bernegara. Pandangan *siyasah syar'iyah* yang bersumber dari prinsip dasar Al-quran dan Hadist menjelaskan bahwa adanya sistem politik harus diarahkan untuk pemeliharaan agama dan harmonisasi sosial oleh sebab itu keberadaan pemerintah dibebankan sebagai amanah untuk mensejahterakan masyarakat tanpa perbedaan status sosial. Adapun salah satu praktek nasionalisme tanpa adanya perbedaan kelas sosial yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, dapat dilihat dari konteks piagam madinah sebagai konstitusi dan komitmen bersama antara orang muslim dan nonmuslim untuk hidup bernegara dengan cita-cita bersama untuk dapat hidup sejahtera baik secara sosial, ekonomi dan politik. Adapun permasalahan dalam artikel ini yaitu berkaitan dengan pandangan Jeffrey A. Winters terkait oligarki politik serta bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* mengkritisi hal tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang sifatnya deskriptif analisis.

Kata kunci: Oligarki: Sistem Politik: *Siyāsah Syar'iyah*.

1. PENDAHULUAN

Hakekat hidup manusia tidak bisa lepas dari rasa keinginan untuk hidup damai dan sejahtera. Rasa keamanan dan kesejahteraan tersebut mungkin terwujud bila mana terdapat manajemen atau pengaturan dalam nuansa hidup berbangsa dan bernegara sehingga di era modern ini untuk mendukung dan menciptakan tatanan hidup bernegara terbentuklah sistem politik sebagai metode untuk menjalankan negara sebagai organisasi dalam kolektivitas manusia. Berbagai macam teori dan sistem politik di setiap negara, baik demokrasi maupun oligarki kesemuanya dijadikan pilihan untuk menjalankan kelangsungan hidup bernegara namun disamping itu realitas kehidupan tidak akan pernah lepas dengan adanya konflik atau permasalahan karena konflik disebabkan oleh kepentingan dan cara pandang yang saling berseberangan.

Islam merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai moralitas dalam menjalani hidup, baik yang berkaitan secara politik maupun sosial ekonomi. Sistem tata nilai ajaran agama islam dimaksudkan agar kehidupan ini berjalan dengan damai dan sejahtera, sehingga dalam konteks bernegara adanya suatu sistem politik yang diterapkan seyogyanya diarahkan pada keadilan secara umum tanpa perbedaan kelas sosial, karena inti dari pada kehidupan yaitu berada pada sejauh mana seseorang memberikan kontribusi tindakan positif dalam rangka bersama-sama menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Indonesia pernah mengalami suatu sistem politik yang bercorak oligarki kolektif. Jeffrey A. Winters menjelaskan bahwa oligarki kekuasaan belum dijinakkan semenjak jatuhnya Suharto sehingga para oligark menggunakan kekayaan mereka untuk bersaing secara tidak adil untuk mendapatkan jabatan dan mengalahkan hukum ketika bermasalah akibat korupsi ataupun bencana (demokrasi kriminal).¹ Kekuatan oligarki politik menempatkan kepentingan pribadi lebih utama dari pada keadilan dan kesejahteraan bahkan hukum dapat dijadikan alat permainan untuk melegitimasi dirinya dan segala kepentingan kelompoknya.

Kekuatan politik sering kali menjerumuskan manusia ke jurang kemiskinan dan kesengsaraan. Manusia karapkali menjadi serigala bagi manusia lainnya oleh sistem politik yang mengedepankan pragmatisme dengan meninggalkan aspek-aspek moral yang religius sehingga harapan terbentuknya negara sebagai alat untuk mensejahterakan rakyatnya berbelok dari tujuan utama sebuah organisasi besar bernama

¹ Lihat, Jeffrey A. Winters dalam kata pengantarnya menjelaskan bahwa: transisi lain yang cukup beda dari oligarki sultanistik yang dijinakkan Suharto menjadi oligarki kekuasaan yang belum dijinakkan semenjak jatuhnya Suharto. Transisi kedua itulah yang tak kurang penting di dibanding yang pertama, yang menjadi sumber banyak kesulitan di Indonesia. Keadaan Indonesia yang sering disalahtafsirkan sebagai masalah "kualitas demokrasi" berupa munculnya "demokrasi kriminal" dimana para oligark menggunakan kekayaan mereka untuk bersaing secara tidak adil untuk mendapatkan jabatan dan mengalahkan hukum ketika bermasalah akibat korupsi ataupun bencana. Oligarkhi Terj., (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

negara. Kesejahteraan dan keadilan seakan hanya dimiliki oleh sekelompok kecil ditengah-tengah mayoritas dalam suatu negara bahkan hukum yang dibuat untuk mengatur seluruh rakyat hanya dijadikan bingkai-bingkai untuk menutupi konspirasi oligarki politik bahkan sistem oligarki dapat dikatakan awal perampasan hak asasi manusia dalam kontribusi politik suatu negara.

Terjadinya perbedaan status tidak dapat dibenarkan dalam tata nilai filosofis manusia, karena hakekatnya manusia lahir dalam keadaan yang sama dan memiliki hak serta kewajiban yang ideal dan pantas. Nilai moralitas dan humanisme sosial harus diletakkan pada posisi politik yang sepadan tanpa adanya ukuran materialisme dalam kontek merawat dan mengendalikan suatu negara. Idealnya suatu sistem politik yaitu ketika berada pada posisi diakuinya suatu rakyat yang mempunyai kesempatan politik yang sama untuk dapat menunggangi negara agar lebih baik, maka adanya politik oligarki justru mencederai hak dan martabat sebagai manusia yang diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi.

Kesenjangan-kesenjangan juga dapat lahir dalam tatanan sistem oligarki politik karena dasar pemikiran utama oligarki adalah pengendalian suatu negara yang dilakukan oleh kaum minoritas sehingga menghasilkan aspek sosial ekonomi yang tidak merata bahkan rasa kesejahteraan umum sulit terealisasikan, justru yang ada hanyalah produktivitas kaum minoritas (elit politik) namun di sisi lain terjadi dekadensi kaum mayoritas (rakyat).

Kesenjangan tersebut bukanlah suatu hal yang diharapkan bagi seluruh rakyat dalam suatu negara. Sistem oligarki politik dirasakan telah berkembang dengan berbagai motif yang transparan namun hakekatnya menunjukkan arti oligarki yang sesungguhnya, hal ini dapat dikaitkan dengan adanya praktik kolusi nepotisme dan korupsi (KKN) yang cenderung menguntungkan satu pihak dan berdampak merugikan dipihak lain. Pragmatisme keduniaan yang melampawi batas menggiring nilai dan tatanan hidup yang tidak seimbang sehingga ketidak seimbangan ini akan menimbulkan sikap-sikap ekstrim dan perlawanan terhadap elitk politik sehingga perlu adanya keseimbangan moralitas dalam sistem politik ke araha masa depan. Perputaran elit politik yang tidak berubah akan mengakibatkan stagnasi dalam ide-ide produktif dan cenderung menterbelakangkan tantangan hidup rakyat secara sosial ekonomi sehingga yang akan tercipta kesejahteraan bagi pemain politik dan kesengsaraan bagi rakyatnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library researc*) dengan menggunakan pendekatan normatif, artinya segala kajian dalam *siyasah syar'iyah* dihadapkan serta dijadikan jawaban atas permasalahan teori dan aktivitas oligark.

Masalah yang akan dikaji yaitu pandang Jeffrey A. Winters tentang teori oligarki dan seperti apa analisis *siyasah syar'iyah* terkait hal tersebut. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder baik dari buku literatur, jurnal dan media kepustakaan lainnya yang dirasa relevan dan mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian ini, kemudian cara pengambilan dan pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan, memilih dan memilah segala data yang berhubungan dengan judul penelitian ini untuk kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis sehingga terbangun suatu argumentasi ilmiah sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pandangan Jeffrey A. Winters tentang Oligarki Politik

Oligarki sering sekali dibahas dan dibicarakan dalam kalangan dunia akademisi yang lebih khususnya pada kalangan penggiat politik maupun hukum tatanegara. Secara nyata oligarki politik masih banyak terjadi walaupun negara tersebut tidak secara resmi mendeklarasikan paham oligarki dalam konstitusinya, namun dewasa ini prakteknya lebih mengerah pada implementasi yang lebih substantif dari pengertian oligarki politik.

Di banyak tempat seperti di Philipina, Thailand praktek oligarki politik ini tidak banyak memunculkan perlawanan sosial dari kekuatan masyarakat, kecuali adanya gesekan politik antar sesama oligarch dalam perebutan sumber daya daerah.² Mengetahui konsep oligarki politik tentunya memerlukan pengertian secara terpisah antara sistem, oligarki dan politik. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif di pegang oleh kelompok kecil dari masyarakat, baik dibebankan menurut kekayaan, keluarga atau militer.³ *Internasional encyclopedia of social sciences* mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas.⁴ Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa kelompok bermodal, keturunan ataupun kalangan militer menjadi penentu haluan dan gerak suatu negara. Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan.⁵ Berdasarkan pengertian oligarki dan politik dapat ditarik suatu pemahaman bahwa oligarki politik adalah suatu konsep pemerintahan yang dimobilisasi oleh minoritas kecil baik didasari oleh aspek kekayaan, keluarga atau militer secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa paham oligarki adalah kebalikan dari demokrasi. Terlepas dari

² Abdur Rozaki, *The Contribution of Indonesian Islam To The World Civilization*, Proceedings Annual Conference Of The International On Islamic Studies, (IAIN Raden Intan Lampung: November 2016) hlm. 185

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 17 April 2021

⁴ *Ibid*, Jeffrey A. Winters, hlm.. 1

⁵ *Ibid*

itu semua praktik yang umum oligarki politik dapat dilihat ketika kekuasaan diperoleh berdasarkan sumber kekayaan, kekeluargaan dan kekuatan militer. Maka menurut Charles F. Adriaan terdapat 5 tipe sumber daya kekuasaan, pertama sumber daya fisik, kedua sumber daya ekonomi, ketiga sumber daya normatif, keempat sumber daya personal, kelima sumber daya ahli.⁶

Teori oligarki secara komprehensif lebih dijelaskan oleh Jeffrey Winters bahwa makna kata oligarki berasal dari kata oligarch yang berarti pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.⁷ Arah oligarki politik bersifat pragmatisme dan menyingkirkan aspek-aspek etis dalam hidup bernegara berbeda dengan negara yang demokratis yang secara pengertian berada sepenuhnya di tangan rakyat, namun bukan berarti praktik oligarki tersebut tidak dijumpai sekalipun itu adalah negara demokrasi. Adanya kontribusi politik kaum minoritas dapat juga berupa kekuasaan kapitalisme untuk mengendalikan pemangku jabatan agar mengeluarkan produk hukum yang menguntungkan pihak kapitalisme. Praktik semacam ini yang akan mengakibatkan kesenjangan ekonomi sehingga tidak mustahil suatu saat nanti negara yang demokratis akan menjadi selogan yang berisi tulisan-tulisan oligarkisme. Sifat manusia yang cenderung pragmatis akan melakukan segala macam cara untuk memuaskan keinginan pribadi maupun kelompoknya sehingga tidak mustahil suatu saat nanti akan ada negara yang dijadikan alat bisnis untuk kepentingan usahanya.

Oligarki politik secara implementatif umumnya terletak pada aktivitas minoritas yang berusaha menguntungkan dari sendiri atau satu kelompok tertentu secara material yang berakibat pada kerugian orang banyak atas usahanya dan bersifat konspiratif. Max Weber memahami kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sekalipun ada perlawanan.⁸ Artinya adanya rakyat seakan diposisikan sebagai kaum borjuis untuk memuaskan keinginan para kapitalis, sehingga oligarki politik yang mengakar justru cenderung bertindak sewenang-wenang oleh karena itu hakekat oligarki dalam diri manusia terletak pada kepribadian dan sifat dari seseorang maupun sekelompok orang. Oligarki berbeda dari semua minoritas lainnya karena dasar kekuasaan mereka kekayaan material, kekayaan pribadi yang sangat besar merupakan ketidak seimbangan kekuasaan sosial dan politik luar biasa.⁹ Kekuasaan minoritas tersebut dapat dibidang bukan bersumber dari kesepakatan seluruh warga negara namun lebih pada klaim kepemilikan pribadi ataupun kelompok tertentu

⁶ P. Antonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hlm, 55-56

⁷ *Ibid*, hlm 8.

⁸ Muhtar Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 23

⁹ *Ibid*, hlm. 5

sehingga berdampak pada lemahnya produktifitas warga negara dibidang sosial, ekonomi dan politik sehingga kemungkinan besar akan terjadi kelas-kelas dalam tatanan sosial. Seperti halnya laporan riaz haq yang menyebutkan bahwa para oligark india yang terbesar yaitu berasal dari kalangan industrial seperti Ambanis, Adanis, Birlas, mittals, premjis dan tatas.¹⁰ Oleh sebab itu dari akibat oligarkisme dalam suatu negara akan menggambarkan kehidupan orang kaya semakin bertambah jaya namun di sisi lain orang miskin akan tertekan atas ketidak seimbangan tersebut.

Dalam catatan Jeffrey A. Winters dijelaskan bahwa Indonesia pernah menampilkan nuansa oligarki kolektif setelah lengsernya orde baru. Artinya, runtuhnya orde baru (zaman suharto) yang seharusnya menjadi perubahan dan nafas baru bagi demokrasi di Indoensia justru masih meninggalkan bekas-bekas oligarki sekelompok orang. Dengan demikian, konsolidasi demokrasi di Indonesia pun menghadapi tantangan besar yaitu kenyataan bahwa negara masih jauh dari demokrasi yang sebenarnya.¹¹

Menurutnya semua oligarki bisa digolongkan menurut empat ciri utama, yaitu kadar keterlibatan langsung Oligarki dalam pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas harta dan kekayaan; keterlibatan Oligark dalam kekuasaan atau pemerintahan; sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasaan itu, apakah terpecah atau kolektif; dan Oligark bersifat liar atau jinak.¹² Terdapat 4 (empat) tipe ideal dari oligarki;¹³ pertama oligarki panglima (*warring oligarchy*) merupakan oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa, Kedua; oligarki penguasa kolektif (*ruling oligarck*) jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main; ketiga, oligarki sultanistik (*sultanistic oligarchy*) bentuk oligarki yang sarana pemaksaannya terletak pada satu tangan oligark.; keempat, oligarki jinak dan liar yang sepenuhnya tak bersenjata dan tidak berkuasa langsung.

Dari tipe ideal oligarki diatas dapat diruntut lebih jelas yang pertama bahwa oligarki panglima (*warring oligarchy*) dapat diartikan suatu sistem politik zaman klasik yang mengedepankan alat persenjataan untuk mendapatkan kejayaan secara politik maupun ekonomi. Corak yang demikian tidak jauh dari keterlibatan-keterlibatannya dengan kekerasan dalam mengambil kejayaan material tersebut.

Tipe ideal yang kedua adalah oligarki penguasa kolektif (*ruling oligarck*) dapat digambarkan bagaimana seorang atau sekelompok oligark bersembunyi di balik supremasi hukum dengan selogan demokrasi. Oligark kolektif ini melakukan politisasi

¹⁰ Riaz haq, comparing oligarchies of india and pakistan, diakses pada 19 maret 2021 dari <http://www.Riazhaq.com/2011/08/comparing-oligarkies-of-indiaand.html>.

¹¹ Ahmad munjin, oligarki demokrasi: kajian sumber daya kekuasaan kiai dan jawara di banten, agama dan politik uin syarif jakarta 2017-2018, hlm 3

¹² *Ibid*, Jeffrey A. Winters, hlm. 48

¹³ *Ibid*, hlm. 52-54

di lembaga-lembaga kenegaraan bahkan tidak jarang lembaga tersebut berisikan segerombolan oligarkisme semuanya.

Ketiga adalah oligarki sultanistik (*sultanistic oligarchy*) politik semacam ini yaitu kekuasaan tunggal material dan para oligark yang lain menggantungkan dirinya pada oligark utama tersebut. Corak oligarki semacam ini dapat digambarkan seperti halnya penguasaan material tunggal dengan sifat konspiratif pragmatisme dengan oligark yang berada dibawahnya.

Adapun oligarki jinak dan liar tidak berkuasa secara langsung dan tidak bersenjata, hal semacam ini merupakan bentuk penyerahan kekuasaan oligark pada lembaga yang memiliki legalitas. Artinya seorang oligark hanya berusaha untuk mempertahankan pendapatannya dari lembaga yang dikuasainya, sehingga pengertian yang lebih sederhana dari oligarki jinak dan liar ini adalah sama dengan kekuasaan oligarki sipil.

Secara teoritis oligarki politik merupakan kekuasaan kelompok kecil secara efektif dalam tatanan hidup bernegara. Kekuasaan tersebut dilatar belakangi oleh kejayaan materi, keluarga dan fisik (militer). Kekuasaan merupakan kemampuan (kapabilitas) untuk menguasai atau memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain.¹⁴ Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.¹⁵ Oligarki tersebut merupakan kebalikan dari sistem negara yang demokrasi serta tipe oligarki dalam praktiknya sangat bermacam-macam namun pada intinya oligarki politik adalah kekuasaan minoritas yang cenderung meninggalkan nilai-nilai etis dalam kenyataan hidup bersama sebagai suatu negara yang dihadapkan dan bersinggungan dengan hak-hak manusia dalam suatu wilayah tersebut. Dalam peran dan konfigurasi politik yang lebih luas maka oligarki tidak di identik dengan pemangku kekuasaan secara langsung atau memiliki tugas dan fungsi dalam pemerintahan. Oligarki tidak didefinisikan dengan peran dalam pemerintah tapi tidak harus menjadi pemerintah, karena pemerintah bukan unsur pembentuk oligark, maka ketiadaan oligark dalam peran pemerintah tak berpengaruh pada keberadaan oligark dan oligarki.¹⁶

3.2. Oligarki Politik Dalam Pandangan *Siyasah Syar'iyah*

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan bagaimana tata cara beribadah pada sang pencipta namun lebih luas dari itu, islam juga menjelaskan tata cara dalam menjalankan kehidupan baik dengan berkumpul sebagai suatu negara

¹⁴ H. Rachmat, Dadang Gunawan, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 78

¹⁵ Abdil Mughis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*, Jurnal Sosiologi (Vol. 18, No. 1, 2013).

¹⁶ *Ibid*, Jeffrey A. Winters, Hlm. 58

maupun komunitas sosial lainnya. Dalam konteks bernegara dan politik, agama islam menjelaskannya dalam suatu kajian tersendiri yang dikenal dengan siyasah syar'iyah. Siyasah syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at.¹⁷ Syariat adalah hukum-hukum yang bersifat amaliah.¹⁸ Secara linguistik siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, siyasah diartikan pula dengan politik.¹⁹ Maka jelasnya siyasah syar'iyah adalah segala urusan dalam konteks kenegaraan yang didalamnya bersinggungan dengan cara berpolitik suatu negara yang dilihat kesesuaiannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'at.

Dalam tradisi pemikiran islam, tidak ada istilah tunggal yang menunjukkan pada konsepsi tentang negara dalam pengertian modern.²⁰ Maka sejauh penelitian ini, belum ditemukan juga istilah dan pengertian tunggal tentang politik dalam Al-qur'an dan Hadist namun yang ada hanyalah pesan-pesan etis yang dapat dijadikan pedoman berpolitik dalam suatu negara karena, Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai (H.A djazuli: 2003). Menurut Zaini Rahman Al-Qur'an bersifat universal dan komprehensif sehingga digunakanlah bahasa yang global.²¹ Singkatnya *siyasah syar'iyah* berpuncak harapan pada penggiringan kemaslahatan manusia dalam konteks politik dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama islam. Artinya dalam siyasah syar'iyah tidak ada keterangan terkait konsep dan sistem absolut yang menjadi kewajiban seorang muslim untuk memilih dan melaksanakan sistem politik tertentu begitu pula dengan bentuk-bentuk negara. Praktik politik dalam islam salah satunya terjadi pada zaman kenabian dan salah satu puncak keberhasilannya ketika Nabi Muhammad saw yang mampu meletakkan bangunan politik ala modern dengan pengertian baru tentang nasionalisme sebagai ganti dari *ashabiyah*, selanjutnya ikatan perksekutuan yang didasarkan pada kekerabatan dan suku di Madinah berubah menjadi ikatan yang didasarkan pada persekutuan *ummah*.²² Hal itu semua seharusnya bisa dijadikan contoh untuk ummat muslim pada generasi yang akan datang dalam tata cara berpolitik ala Rosulullah saw.

Berkenaan dengan penjelasan oligarki politik sebagaimana di awal, maka siyasah syar'iyah memberikan pandangan bahwa hal demikian berseberangan dengan prinsip dasar al-qur'an dan hadist sehingga dalam konteks menjalankan kehidupan bersama-sama sebagai suatu negara maka siyasah syar'iyah lebih menekankan kepada tantangan

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2013) hlm. 5

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2

¹⁹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: pustaka setia 2013) hlm. 395.

²⁰ Zaini Rahman, *Fiqih Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara 2016) hlm. 84

²¹ *Ibid*, hlm 4

²² Robert N, Bellah, Ibnu khaldun dalam Zaini Rahman, hlm. 89

kemaslahatan yang harus dirasakan oleh semua elemen masyarakat dan bukan sebatas kejayaan minoritas. Dalam syari'ah hal demikian dapat dilihat pada *nash* Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 58²³ yang menjelaskan untuk bertindak amanah dan berlaku adil, Surat Al-mu'minin ayat 52²⁴ perintah untuk mewujudkan pesatuan dan kesatuan ummat, Surat Al-hasyr ayat 7²⁵ perintah untuk pemerataan peredaran harta (larangan penimbunan harta) dan Surat Al-imron ayat 159²⁶ perintah untuk bermusyawarah dalam suatu urusan. Adapun kata urusan dalam surat-al-imron tersebut mencangkup hal-hal yang sanga luas dalam kehidupan manusia. Dalam perkataan "urusan" tercakup urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya.²⁷

Berdasarkan prinsip-prinsip syari'at tersebut maka dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai politik dalam pandangan siyasah syar'iyah dimaksudkan dan diarahkan kepada tata nilai moralitas yang mana puncak tujuannya adalah keadilan sosial tanpa perbedaan. Adanya oligarki politik yang dalam pengertiannya tersebut merupakan bentuk kekuasaan yang dimiliki dan diterminan oleh segelintir oligark tentu secara dogmatik²⁸ maupun praktiknya mencederai hakekat hidup damai, adil dan sejahtera. Sebaliknya justru aktivitas politik dalam siyasah syar'iyah lebih menekankan kepada aspek etis yang berkaitan dengan pemerataan hak sosial, ekonomi dan politik tentunya berdasarkan rambu-rambu hukum yang responsif dan aspiratif dengan tidak bertentangan bersama *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Lebih jelasnya kontroversi oligarki politik berdasarkan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah adalah kekuasaan yang hanya berputar pada kalangan minoritas secara efektif dengan kecenderungan menimbulkan ketidakadilan sosial, ekonomi maupun politik, oleh sebab itu keberadaan rakyat sulit untuk tumbuh berkembang secara politis.

Dalam sejarah politik islam perpolitikan berjalan dengan memperhatikan nilai kemaslahatan manusi. Pada peristiwa politik pada zaman Nabi Muhammad saw terdapat berbagai macam suku dan perbedaan keyakinan hidup dalam satu komunitas sosial dibawah kepemimpinan Rosulullah saw. Sebagaimana dalam konstitusi madinah dikatakan bahwa pluralitas suku yang ada diikat dalam satu kesepakatan bersama dalam bingkai solidaritas negara, bangsa dan *ummah* tentu dalam pengertian sebagai warga negara.²⁹ Dari piagam madinah itulah dapat digambarkan politik Rosulullah yang dilakukan tanpa adanya perbedaan ras dan suku untuk hidup bersamaan dengan

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil".

²⁴ *Ibid*, "Sesungguhnya ummat kamu ini umat yang satu, dan aku tuhan kamu bertakwalah kamu kepada-Ku".

²⁵ *Ibid*, "Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu".

²⁶ *Ibid*, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".

²⁷ *Ibid*, Iqbal. Hlm. 3

²⁸ Pengertian "Dogma" tersebut yang dimaksud adalah paham,ajaran,konsep dan sistem oligarki politik.

²⁹ *Ibid*, zaini rahman, hlm. 87

keinginan dan cita-cita kesejahteraan sosial. Selanjutnya Munawir Sjazili mengungkapkan, karenanya Bani Aus yang notabenehnya Yahudi juga dapat menikmati haknya sebagai umat madinah.³⁰ Berdasarkan contoh Nabi Muhammad saw berpolitik dapat tergambarkan dengan jelas bahwa sejarah politik islam bercorak lain dengan oligarki politik, hal itu dapat dilihat dengan pemberian hak sosial kepada Bani Aus bahwa prinsip dasar dalam siyasah syar'iyah adalah politik etis atau moralitis yang mengedepankan sistem nilai keadilan dan kesejahteraan bersama dalam konteks bernegara. Pada praktek politik dapat terlihat bagaimana Rosulullah ingin merangkul seluruh suku yang berbeda-beda kedalam satu negara dengan tanggung jawab yang sama, yaitu memelihara negara dan menciptakan kondisifitas wilayah. Persamaan dan pemerataan yang dilakukan oleh Nabi sebenarnya telah meletakkan suatu tatanan politik yang mengedepankan kepentingan umum, bahkan dapat dibbilang bahwa Piagam Madinah adalah embrio politik masa kini di berbagai tempat tertentu dan masa yang akan datang.

Dalam praktek sahabat³¹ Nabi Muhammda saw setelah nabi wafat maka pergantian kepemimpinannya yang akhirnya jatuh pada abu bakar dilakukan dengan prinsip musyawarah dan hal ini tentunya berlawanan dengan kekuasaan oligarki yang lebih jarang mengepankan perundingan dalam proses pergantian kepemimpinan dengan kalangan rakyat. Namun sahabat-sahabat Nabi lebih mengedepankan permusyawarahan dalam proses pergantian kepemimpinan tanpa adanya kekerasan seperti oligarki panglima dalam pengambilan kekuasaannya. Setelah Nabi Muhammad wafat, sebagian kaum Anshar mengadakan pertemuan untuk membicarakan suksesi di Tsaqifah Bani Sa'idah. Dalam perdebatan yang alot antara Muhajirin dan Anshar, akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah.³² Dari peristiwa inilah tergambarkan bagaimana politik yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi dilakukan dengan proses perundingan sehingga hal ini menepis anggapan-anggapan oligarki politik dalam catata sejarah islam dan merupakan suatu perbedaan yang jelas antara oligarki politik dengan politik ala nabi dan para sahabatnya. Walaupun dalam al-qur'an dan hadist tidak istilah istilah tunggal politik namun dalam praktik rosulullah dan para sahabatnya adalah contoh dan yang harus dijadikan pelajaran berpolitik dengan mengedepankan isitem nilai etis sehingga siyasah syar'iyah merupakan suatu acuan dalam berpolitik berdasarkan prinsip dasar agama islam.

³⁰ *Ibid*

³¹ Sahabat Nabi yang dimaksud adalah Abu Bakar, Umar bin Khattob, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Tolib

³² *Ibid*, Muhammad Iqbal, hlm 121

4. KESIMPULAN

Secara pengertian oligarki politik merupakan kekuasaan yang didominasi oleh sekelompok minoritas berdasarkan sumber daya kekayaan, keluarga dan militer. Dewasa ini Jeffrey A. Winters membagi tipe ideal oligarki dalam suatu negara. pertama oligarki panglima (*warring oligarchy*) merupakan oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa, Kedua; oligarki penguasa kolektif (*ruling oligarck*) jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main; ketiga, oligarki sultanistik (*sultanistic oligarchy*) bentuk oligarki yang sarana pemaksaannya terletak pada satu tangan oligark.; keempat, oligarki jinak dan liar yang sepenuhnya tak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Siyasah syar'iyah yang merupakan politik dengan bertumpu atau bersumber dari nash-nash al-qur'an dan hadist telah menyerukan untuk berbuat adil, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dalam berkehidupan lebih-lebih dalam membangun suatu negara yang makmur dan adil. Maka oligarki politik juga di dajawab dengan praktik politik rosulullah serta para sahabatnya yang mengedepankan politik etis sesuai dengan sistem nilai dalam al-qur'an yang secara komprehensif menjunjung tinggi persamaan hak dan produktivitas soial ekonomi. Dengan membangun sistem politik berdasarkan Siyasah syar'iyah juga dapat dijadikan perubahan dalam membangun manusia dari belenggu-belenggu meterialisme kehidupan untuk bangkit dari keterburukan kualitas politik sehingga dengan demikianlah syari'at memberikan cara untuk menjadikan kehidupan manusia makmur dan sejahtera.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Rozaki, A (2016) *The Contribution of Indonesian Islam To The World Civilization*, Proceedings Proceedings Annual Conference Of The International On Islamic Studies, IAIN Raden Intan Lampung
- Rahman, Z (2016). *Fiqih Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajara
- Haboddin, M (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang: UB Press
- Iqbal, M (2013) *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Fauzan , J, M,. (2013) *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia
- Rachmat, H & Gunawan, D (2016) *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sitepu, A (2012) *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jeffrey A. Winters, (2011) *Oligarkhi* (Terj.,zia Anshor), *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Munjin, A. (2017-2018) *Oligarki Demokrasi: Kajian Sumber Daya Kekuasaan Kiai Dan Jawara Di Banten*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mudhoffir, A. (2013) Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik, *Jurnal Sosiologi* 18 (1).

Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Riaz Haq, <http://www.riazhaq.com/.2011/08/comparing-oligarkies-of-india-and.html>. 23Haq, "Comparing Oligarkies
- Al-qur'an terjemah, <https://quran.kemenag.go.id/>